|  |  |
| --- | --- |
| LOGODESA | **PEMERINTAH KABUPATEN .........................**  **KECAMATAN ..................**  **KEPALA DESA ...........................**  Jl. ........... No...., Tlp............................ Email: [..........................................](mailto:pemdeswarukulon@yahoo.com)  **DESA .........................**  Kode pos. ......... |

……………, ……………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | 140/ … / xx.xx.xx.xxxx / 2020 | Kepada: |
| Sifat | : | Penting | Sdr. Camat ………… |
| Lampiran | : | … (…) berkas | Di |
| Perihal | : | Permohonan Rekomendasi Mutasi Jabatan Perangkat Desa | ………………………. |

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Hasil musyawarah Pemerintah Desa ……………… Tanggal ………………. Perihal mutasi Perangkat Desa.

Maka dengan ini mohon kepada Saudara Camat ………………. memberikan rekomendasi mutasi Perangkat Desa ……………… atas nama Suadara ………………. Dari Jabatan Lama sebagai …………… manjadi Jabatan Baru sebagai …………………

Sebagai pendukungnya, bersama ini disampaikan:

1. Hasil musyawarah Pemerintah Desa ……………… Tanggal ………………. Perihal mutasi Perangkat Desa.
2. Draf keputusan kepala desa nomor … tahun … tentang pemberhentian Kepala Dusun …………………
3. Surat Penyataan Kesanggupan dimutasi.
4. Foto copy kartu tanda penduduk.
5. Foto copy kartu keluarga.

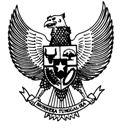
Demikian Surat Permohonan ini disampaikan dan terimakasih natas kerjasamanya.

Kepala Desa ………………

**……………………**

Tembusan

Yth. Sdr. Ketua BPD ………………



DRAF

**KEPALA DESA ………………..**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR … TAHUN …..**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN ………………………**

**MENJADI …………………**

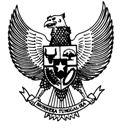
**KEPALA DESA ……………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal .. ayat (…) Peraturan Bupati Kabupaten ………………. Nomor …. Tahun …… tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2. Bahwa berdasarkan pertimbaqngan diktum a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037; 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158; 8. Peraturan Daerah Kabupaten .................... Nomor ... Tahun ...... tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun ........ Nomor .....; 9. Peraturan Bupati ……………. Nomor … Tahun ....... Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa; Berita Daerah Kabupaten .................... Tahun ........ Nomor .....; 10. Peraturan Bupati ………… Nomor ….. Tahun ….. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamngan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ..... Nomor ...; |
| Memperhatikan | : | Rekomendasi Camat …………….. Nomor ……………. Tertanggal ………………. Tentang …………………………….. |

**M E M U T U S K A N**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  | | |
| Pertama | : | Mengangkat Saudara: | | |
|  |  | Nama | : |  |
|  |  | Tempat Tanggal Lahir | : |  |
|  |  | Alamat | : |  |
|  |  | Jabatan Lama | : |  |
|  |  | Jabatan Baru | : |  |
|  |  | Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | | |
| Kedua | : | Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. | | |
| Keempat | : | Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan. | | |
| Kelima |  | Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya; | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : ……………..  Pada Tanggal : …………….. |
|  | **KEPALA DESA ………………..**  **……………………….** |



SALINAN

DRAF

**KEPALA DESA ………………..**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR … TAHUN …..**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN ………………………**

**MENJADI …………………**

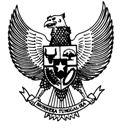
**KEPALA DESA ……………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal .. ayat (…) Peraturan Bupati Kabupaten ………………. Nomor …. Tahun …… tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2. Bahwa berdasarkan pertimbaqngan diktum a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa. |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037; 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158; 8. Peraturan Daerah Kabupaten .................... Nomor ... Tahun ...... tentang Desa; Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun ........ Nomor .....; 9. Peraturan Bupati ……………. Nomor … Tahun ....... Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Di Desa; Berita Daerah Kabupaten .................... Tahun ........ Nomor .....; 10. Peraturan Bupati ………… Nomor ….. Tahun ….. Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Kabupaten Lamngan; Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun ..... Nomor ...; |
| Memperhatikan | : | Rekomendasi Camat …………….. Nomor ……………. Tertanggal ………………. Tentang …………………………….. |

**M E M U T U S K A N**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  | | |
| Pertama | : | Mengangkat Saudara: | | |
|  |  | Nama | : |  |
|  |  | Tempat Tanggal Lahir | : |  |
|  |  | Alamat | : |  |
|  |  | Jabatan Lama | : |  |
|  |  | Jabatan Baru | : |  |
|  |  | Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | | |
| Kedua | : | Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. | | |
| Keempat | : | Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan. | | |
| Kelima |  | Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya; | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : ……………..  Pada Tanggal : …………….. |
|  | **KEPALA DESA ………………..**  **ttd**  **……………………….** |
| |  |  | | --- | --- | | Salinan Sebagaimana Aslinya  Pada Tanggal ………………….  Oleh:  SEKRETARIS DESA ……………..  **………………….** |  | | |



DRAF

**KEPALA DESA ………………..**

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA**

**NOMOR … TAHUN …..**

**TENTANG**

**MUTASI JABATAN ………………………**

**MENJADI …………………**

**KEPALA DESA ……………..**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | Dan seterusnya; |
| Mengingat | : | Dan seterusnya; |
| Memperhatikan | : | Dan seterusnya; |

**M E M U T U S K A N**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : |  | | |
| Pertama | : | Mengangkat Saudara: | | |
|  |  | Nama | : |  |
|  |  | Tempat Tanggal Lahir | : |  |
|  |  | Alamat | : |  |
|  |  | Jabatan Lama | : |  |
|  |  | Jabatan Baru | : |  |
|  |  | Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan berhak mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. | | |
| Kedua | : | Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam melaksanakan tugas harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. | | |
| Ketiga | : | Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. | | |
| Keempat | : | Salinan keputusan ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan dan kepada ketua BPD sebagai pemberitahuan. | | |
| Kelima |  | Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya; | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ditetapkan di : ……………..  Pada Tanggal : …………….. |
|  | **KEPALA DESA ………………..**  **ttd**  **……………………….** |
| |  |  | | --- | --- | | Salinan Sebagaimana Aslinya  Pada Tanggal ………………….  Oleh:  SEKRETARIS DESA ……………..  **………………….** |  | |  | | | |